

ABSTRAK

Shela Nur Azizah, 1213040125, 2025, Siyasah Syari'yyah Terhadap Sanksi Penangkapan Hasil Laut Ilegal di Perairan Indonesia Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Qonun Aceh No. 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan.

Penelitian ini menganalisis Sanksi Ilegal Fishing dalam Siyasah Syari'yyah. UU No. 45 Tahun 2009 menetapkan berbagai sanksi hukum bagi pelaku ilegal fishing, termasuk pidana dan denda administratif. Sementara itu, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2010 memberikan pendekatan berbasis kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan dalam pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran ilegal fishing, analisis terhadap UU dan Qanun Aceh dengan prinsip Siyasah Syari'yyah, serta membandingkan efektivitas kedua regulasi tersebut dalam menanggulangi praktik ilegal fishing. Kajian ini juga menelaah bagaimana hukum Islam memberikan pandangan terhadap praktik eksploitasi sumber daya laut secara ilegal dan bagaimana regulasi tersebut dapat diterapkan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Maqasid al-syar'iyah memandang penerapan sanksi terhadap penangkapan hasil laut ilegal harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan. Pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap pelaku ilegal fishing mencerminkan maqasid al-hifz yang bertujuan untuk menjaga harta (hifz al-mal) dan kehidupan masyarakat pesisir. Namun, dalam implementasinya, pendekatan hukum juga harus menyeimbangkan antara aspek penegakan hukum yang ketat dengan kebijakan yang memberikan kesempatan bagi nelayan kecil agar tetap dapat mencari nafkah secara legal dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis dokumen untuk menggali pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan syariah terhadap sanksi penangkapan hasil laut ilegal di Indonesia. Temuan utama penelitian ini menyoroti kompleksitas penegakan hukum terkait perikanan ilegal.

Kesimpulannya, analisis ini menunjukkan bahwa: pertama, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menekankan sanksi pidana dan administratif bagi pelaku illegal fishing. Kedua, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 mengadopsi prinsip syariah dengan menekankan pencegahan dan pemulihan lingkungan sebagai hukuman edukatif. Ketiga, dalam perspektif Siyasah Syari'yyah, sanksi harus seimbang antara keadilan hukum, perlindungan ekosistem laut, dan kesejahteraan nelayan sesuai dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2010, Ilegal Fishing.